

Pengaruh *Firm Size*, *Subsidiaries*, dan *Auditor Size* terhadap *Audit Fee*

Fisca Adhitya Fatimah Nurdjanti ¹⁾ & Wahyu Pramesti ²⁾

IAIN Surakarta

**ARTICLES
INFORMATION**



Journal of Islamic Finance
and Accounting

Vol. 1 No. 1
Januari-Mei 2018
pp: 15-28

Department of Sharia
Accounting, Faculty of
Islamic Economics and
Business, IAIN Surakarta

*Keywords: Firm Size,
Existence of a Subsidiary,
Size of the Public
Accounting Firm and
Audit Fees*

*JEL Classification: G38,
M42, M410*

Abstract

The aims of this study is to determine the effect of firm size, subsidiaries, and auditor size to the audit fee. This study tested the company listed in Indonesia Sharia Stock Index (ISSI) for the year 2013-2016. This study obtained 37 companies as a sample in four years. Data were analyzed using multiple linear regression analysis model. The results of this study showed that firm size, subsidiaries, and auditor size have positive and significant impact on audit fees. In this study the entire hypothesis can be accepted.

PENDAHULUAN

Desender *et al* (2009) menjelaskan bahwa akuntan publik adalah akuntan yang melakukan fungsi pengauditan atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Menurut Nugraheni dan Sabeni (2013) jika akuntan publik melakukan pengauditan suatu laporan keuangan perusahaan maka perusahaan tersebut harus mengeluarkan biaya atas audit laporan keuangan yang disebut dengan *audit fee*. Besarnya *audit fee* ditentukan melalui proses negosiasi antara pihak stakeholders dengan kantor akuntan publik dengan memperhatikan beberapa faktor (Immanuel dan Yuyetta, 2014).

Menurut Nugraheni dan Sabeni (2013) masalah mengenai *audit fee* sangat rentan karena *audit fee* dapat mempengaruhi independensi seorang auditor. Di Indonesia sampai saat ini *audit fee* berpedoman dengan surat keputusan ketua umum Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) nomor KEP.24/IAPI/

Corresponding author:

¹⁾ fiscanurdjanti@gmail.com

VII/2008 pada tanggal 2 Juli 2008 tentang Kebijakan Penentuan *Fee Audit* dalam bagian Lampiran 1. Dalam surat keputusan tersebut dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik Indonesia yang menjalankan praktik sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbalan yang wajar atas jasa profesional yang diberikannya. Hal ini didukung oleh pernyataan dalam IAPI (2008) yang menjelaskan dalam menetapkan imbalan jasa yang wajar sesuai dengan martabat profesi akuntan publik dalam jumlah yang pantas.

Namun untuk besarnya audit fee/standar besarnya *audit fee* yang harus ditagihkan atas jasa audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik belum terdapat aturan yang jelas (Fuad, 2012). Hal ini tentunya akan memberikan indikasi bahwa penentuan *audit fee* dilakukan secara subyektif atas dasar tawar menawar antara auditor dan klien dalam situasi persaingan sesama akuntan publik (Primasari dan Sudarno, 2013). Sehingga memungkinkan besarnya *fee* terlalu rendah atau terlalu tinggi (Suharli dan Nurlaelah, 2008).

Praktik akuntan publik harus dilakukan melalui suatu Kantor Akuntan Publik (KAP). KAP adalah suatu bentuk organisasi para akuntan publik yang sudah memperoleh izin sesuai dengan UU yang memberikan jasa *professional* didalam praktek akuntan publik (Mulyadi 2009). Immanuel dan Yuyetta (2014) menyatakan bahwa KAP yang memiliki reputasi internasional tentu memiliki jam terbang yang lebih tinggi, klien yang lebih banyak, efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik lokal. KAP yang memiliki reputasi internasional dipandang lebih baik dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan dibandingkan KAP lokal.

KAP yang bereputasi secara internasional sering dikenal dengan istilah KAP *big four*. Sehingga KAP *big four* dapat diartikan memiliki kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan KAP *non big four*. Jika suatu perusahaan dalam proses pengauditannya menggunakan KAP *big four* maka *audit fee* yang diberikanpun akan lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan KAP *non big four*. Maka dalam hal ini *auditor size* dapat berhubungan dengan *audit fee*. Berdasarkan penelitian Immanuel dan Yuyetta (2014) yang menyatakan bahwa *auditor size* berpengaruh positif terhadap *audit fee*. Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian Suharli dan Nurlaelah (2008) yang menyatakan bahwa *auditor size* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap *audit fee*.

Firm size juga menjadi salah satu faktor untuk menentukan besarnya *audit fee* yang dikeluarkan untuk mempekerjakan seorang auditor. Menurut Nugrahani dan Sabeni (2013) *firm size* merupakan faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *audit fee*. Hubungan *firm size* dengan *audit fee* menurut Nugrahani dan Sabeni (2013) yakni bahwa *firm size* yang besar dengan jumlah aset yang besar membuat proses audit yang dilakukan

oleh auditor semakin rumit. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan *audit fee* yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Adapun penelitian lain mengenai *firm size* yaitu oleh Hasan dan Naser (2013) yang melakukan penelitian *audit fee* di Nigeria. Hasil dalam penelitian mereka yaitu *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*. Namun penelitian lain oleh Firth (1985) yang meneliti hubungan antara *firm size* dan *audit fee* di New Zealand dari tahun 1981-1983 dan hasilnya tidak ada pengaruh antara *firm size* terhadap *audit fee*.

Wu (2012) menyatakan bahwa *subsidiaries* juga termasuk faktor yang penting bagi penentuan *audit fee*. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin meningkatkan jumlah *subsidiaries*. Hal ini dikarenakan perusahaan pusat mengalami perkembangan pada kegiatan ekonominya, sehingga peluang untuk memperluas usaha melalui *subsidiaries* semakin besar.

Hubungan antara jumlah *subsidiaries* terhadap *audit fee* menurut Suharli dan Nurlaelah (2008) yakni apabila perusahaan memiliki *subsidiaries* maka proses pengauditan semakin rumit karena perusahaan harus membuat laporan keuangan konsolidasian, sehingga kompleksitas audit yang dikerjakan oleh auditor tersebut meningkat dan juga akan menyebabkan waktu audit yang dibutuhkan auditor lebih lama, maka *audit fee* yang akan ditanggung oleh perusahaan juga akan semakin besar.

Adapun penelitian sebelumnya terkait jumlah *subsidiaries* oleh Jonson (1995) yang melakukan penelitian tentang jumlah *subsidiaries* yang menghasilkan hubungan yang positif signifikan. Penelitian lain oleh Rusmanto dan Waworuntu (2015) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa *subsidiaries* berpengaruh negatif signifikan terhadap *audit fee*.

Audit fee

Menurut Primasari dan Sudarno (2013), *audit fee* adalah imbalan yang diterima auditor atas jasa audit yang diberikan. Selanjutnya Sukrisno Agoes (2012) mendefinisikan *audit fee* sebagai imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien atau pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien atau pihak lain. Menurut Iskak (1999) penetapan biaya audit yang dilakukan oleh KAP berdasarkan perhitungan dari biaya pokok pemeriksaan yang terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya tenaga yaitu manager, supervisor, auditor junior dan auditor senior. Sedangkan biaya tidak langsung seperti biaya percetakan, biaya penyusutan komputer, gedung dan asuransi.

Carcello *et al* (2002) mengatakan bahwa pada saat ini banyak perusahaan yang belum mencantumkan *audit fee* dalam laporan keuangannya. Penyebab belum banyaknya perusahaan yang mencantumkan data tersebut dalam laporan keuangan karena pengungkapan data

tentang *audit fee* di Indonesia masih bersifat *voluntary disclosure* sehingga data tentang *audit fee* akan diwakili oleh akun *professional fee* yang terdapat dalam laporan tahunan (*annual report*) (Rizqiasih, 2010).

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Umum Institut Akuntan Publik Indonesia No:Kep.024/IAPI/VII/2008 bahwa dalam menetapkan imbal jasa (*fee*) audit, akuntan publik harus mempertimbangkan hal-hal sbb:1. Kebutuhan klien; 2. Tugas dan tanggung jawab menurut hukum; 3. Independensi; 4. Tingkat keahlian dan tanggung jawab yang melekat pada pekerjaan; yang dilakukan, serta tingkat kompleksitas pekerjaan; 5. Banyaknya waktu yang diperlukan secara efektif digunakan oleh akuntan publik dan stafnya untuk menyelesaikan pekerjaan; 6. Basis penetapan *fee* yang disepakati

Pengaruh *Firm Size* terhadap *Audit Fee*

Nugrahani dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut berbagai cara antara lain dengan: total aktiva, *log size*, nilai pasar saham, dan lain-lain. Immanuel dan Yuyetta (2014) mengatakan bahwa salah satu tolak ukur yang menunjukkan besar kecilnya perusahaan adalah ukuran aset. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu relatif lama, selain itu juga mencerminkan bahwa perusahaan yang memiliki total aset yang besar relatif lebih stabil dan lebih mampu menghasilkan laba dibanding perusahaan dengan total aset yang kecil. Sehingga jika diaudit pun lebih kompleks dan *fee* auditnya lebih tinggi.

Menurut Nugrahani dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa *client size* adalah faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *fee* audit. Model inilah kemudian yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit. Penentuan ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah aset (kekayaan) yang tinggi membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor eksternal akan semakin rumit. Simunic (1996) mencoba memformulasikan faktor-faktor yang mempengaruhi *fee audit* dan menghasilkan suatu model yang menyatakan bahwa *audit fee* ditentukan oleh besar-kecilnya perusahaan yang diaudit (*client size*). Semakin besar *firm size* yang dinilai dari total aset perusahaan maka meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan akuntan publik atas laporan keuangan tersebut. Hal tersebut akan dibebankan ke perusahaan sebagai salah satu syarat kerja akuntan publik. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: *firm size* berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

Pengaruh *Subsidiaries* terhadap *Audit fee*

Subsidiary disebut juga anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Keberadaan anak perusahaan akan meningkatkan kompleksitas audit yang dilakukan auditor (Immanuel dan Yuyetta, 2015). Menurut Beams dalam Nugrahani dan Sabeni (2013) apabila perusahaan memiliki anak perusahaan di dalam negeri maka transaksi yang dimiliki klien semakin rumit karena perlu membuat laporan konsolidasi.

Hay *et al* dalam Immanuel dan Yuyetta (2015) menyatakan bahwa anak perusahaan mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien kantor akuntan publik untuk diaudit. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin meningkatkan kemungkinan keberadaan anak perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan pusat mengalami perkembangan positif yang signifikan pada kegiatan ekonominya, sehingga peluang untuk memperluas usaha melalui anak perusahaan semakin besar.

Salah satu faktor penentu *audit fee* yaitu *subsidiaries*. *Subsidiaries* atau disebut juga anak perusahaan atau lini induk perusahaan. Penelitian ini mengukur *subsidiaries* berdasarkan akar dari jumlah anak perusahaan (Rusmanto dan Waworuntu, 2015). Penelitian Hay, Knechel and Helen (2008) menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif signifikan antara *subsidiaries* dengan besar penetapan *audit fee*. Semakin kompleks klien, semakin sulit untuk mengaudit dan akan membutuhkan waktu yang lebih lama pula untuk melaksanakan proses audit. Hal itu berakibat pada *audit fee* yang semakin tinggi. Maka hipotesis yang diajukan adalah:

H2 : *subsidiaries* akan berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

Pengaruh *Auditor Size* terhadap *Audit Fee*

KAP adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha yang diatur dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 5 tahun 2011, tentang Akuntan Publik dan izin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik untuk memberikan jasanya. Ikatan Akuntan Indonesia mendefinisikan KAP adalah suatu bentuk organisasi akuntan publik yang memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di bidang pemberian jasa profesional dalam praktek akuntan publik.

Kantor akuntan besar disebutkan memiliki akuntan yang berperilaku lebih beretika daripada akuntan di kantor akuntan kecil (Loeb, 1971). Dengan demikian kantor akuntan besar lebih memiliki reputasi baik dalam opini publik. DeAngelo (1981) menyimpulkan bahwa kantor akuntan publik yang lebih besar dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan kantor akuntan kecil. Dengan demikian pihak

manajemen akan segera menyampaikan laporan akuntan yang telah diaudit kantor akuntan besar secara tepat waktu. Menurut Immanuel dan Yuyetta (2014) kantor akuntan publik yang memiliki reputasi internasional tentu memiliki jam terbang yang lebih tinggi, klien yang lebih banyak, efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik lokal. KAP *big four* dipandang lebih baik dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan dibandingkan KAP *non big four*.

Auditor yang berkualitas adalah auditor yang tergolong kedalam KAP *Big Four* (Rahayu, 2013). KAP *Big Four* tersebut memiliki afiliasi diberbagai Negara termasuk di Indonesia, berikut adalah KAP *Big Four* dan afiliasinya di Indonesia:

1. KAP Purwanto, Suherman & Surja (Ernest & Young)
2. KAP Osman Bing Satrio (Deloitte Touche Tohmatsu)
3. KAP Siddharta dan Widjaja (Klynveld Peat Main Goerdeler)
4. KAP Tanudiredja, Wibisana dan Rekan (PWC/ Price Waterhouse Coopers)

Diacon dalam Nugrahani dan Sabeni (2013) menyatakan bahwa kantor akuntan publik juga berpengaruh terhadap besarnya *fee* audit yang akan diberikan. Maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H3 : *Auditor size* berpengaruh positif terhadap *audit fee*.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menguji pengaruh variabel *firm size*, *subsidiaries* dan *auditor size* terhadap *audit fee*.

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) tahun 2013-2016. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 203 perusahaan. Sedangkan sampel diperoleh menggunakan kriteria tertentu. Perusahaan yang memenuhi kriteria sebanyak 37 perusahaan selama 4 tahun pengamatan. Kriteria yang ditentukan sebagai berikut:

- (1) Saham perusahaan yang terdaftar di ISSI selama periode 2013-2016;
- (2) Perusahaan yang mempublikasikan laporan tahunan dan laporan keuangan auditan;
- (3) Perusahaan yang mengungkapkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian.

Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah menggunakan sumber data sekunder. Yaitu data yang diperoleh dari pihak lain. Data sekunder yang digunakan berasal dari *annual report* dan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di ISSI tahun 2013-2016 dari website Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Variabel Dependen yaitu variabel *audit fee* (Y)
- b. Variabel Independen yaitu variabel *firm size* (X1), *subsidiaries* (X2) dan *auditor size* (X3)

Definisi Operasional Variabel

1. *Audit fee*.

Pelaporan *audit fee* dalam laporan keuangan audit di Indonesia belum menjadi suatu *mandatory disclosure*. Pelaporan *audit fee* hanya sebatas *voluntary disclosure*, hal ini menyebabkan dalam penelitian ini pengukuran *audit fee* menggunakan proksi logaritma natural *professional fee*. *Professional fee* di Indonesia mencakup *fee* bagi tenaga profesional termasuk salah satu di dalamnya *fee* untuk audit. Penggunaan *professional fee* sebagai proksi *audit fee* merujuk pada penelitian Nugrahani dan Sabeni (2013).

2. *Firm Size*.

Pengukuran *firm size* dalam penelitian ini mengacu pada pengukuran *firm size* oleh Suharli dan Nurlaelah (2008). Dalam penelitian tersebut *firm size* diukur dengan menggunakan logaritma natural total aset yang dimiliki perusahaan.

3. *Subsidiaries*.

Akar dari jumlah anak perusahaan dipilih sebagai proksi untuk menggambarkan *subsidiaries*. Hal tersebut merujuk dari penelitian Rusmanto dan Waworuntu (2015).

4. *Auditor Size*.

Untuk mengukur variabel *auditor size* dalam penelitian ini menggunakan variabel dummy 1 dan 0. Angka 1 digunakan bagi perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP *big four*, sedangkan 0 untuk perusahaan yang menggunakan jasa dari KAP *non big four*.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data analisis regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis data dengan regresi linier berganda maka sebelumnya harus dipastikan bahwa data lolos uji asumsi klasik. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji Normalitas, uji heteroskedastisitas, uji Multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Adapun model regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Audit fee} = \alpha + \beta_1 \text{ Ukuran perusahaan} + \beta_2 \text{ anak perusahaan} + \beta_3 \text{ Ukuran KAP} + \varepsilon$$

Setelah ditentukan model penelitiannya, maka langkah selanjutnya adalah menguji ketepatan model dengan menggunakan uji F dan koefisien determinasi (R^2).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, data penelitian diperoleh dari Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) pada Bursa Efek Indonesia yang berupa laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan auditan untuk periode tahun 2013 sampai tahun 2016. Setelah dilakukan uji asumsi klasik pada data yang diperoleh maka dinyatakan data sudah terdistribusi normal, bebas heteroskedastisitas, multikolinearitas dan tidak mengandung autokorelasi.

Dari uji normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov didapat nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* 0,058 menunjukkan nilai tersebut lebih besar dari 0,05 yang berarti data terdistribusi normal. Dari uji multikolinearitas didapatkan nilai *tolerance* variabel *Firm Size*, *Subsidiaries* dan *Auditor size* berturut turut yaitu 0,754; 0,559; dan 0,693 sedangkan nilai *VIF*nya adalah 1,326; 1,789, dan 1,444. Nilai tersebut menunjukkan bahwa tidak terjadi korelasi antar variabel independen.

Hasil dari uji heteroskedastisitas menggunakan uji *glejser* didapatkan hasil nilai signifikansi dari masing-masing variabel independen lebih dari 0,05 sedangkan untuk uji autokorelasi menggunakan *Durbin-Watson* didapat nilainya 1,941. Nilai ini berada pada selang $1,65 < DW < 2,35$. Sehingga asumsi nonautokorelasi terpenuhi.

Adapun untuk menilai ketepatan model regresi digunakan uji F dan koefisien determinasi. Hasil dari uji F menunjukkan bahwa model fit karena signifikansinya $0,000 < 0,05$. Sedangkan dari koefisien determinasi, nilai *adjusted R²* menunjukkan nilai 0,454 yang artinya variabel *audit fee* dapat dijelaskan oleh ketiga variabel independen sebesar 45,4% sisanya 54,6% dijelaskan oleh faktor lainnya.

Langkah selanjutnya yaitu data diolah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Adapun hasil dari analisis regresi bergandanya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	6.748	2.329	-	2.897	.004
Ukuran Perusahaan	.472	.089	.433	5.313	.000
Anak Perusahaan	.256	.077	.242	3.312	.001
Ukuran KAP	.624	.297	.147	2.102	.037
<i>Dependent Variable: Audit fee</i>					

Berdasarkan hasil perhitungan dengan teknik analisis regresi linear berganda diperoleh nilai persamaan regresi:

$$\text{Audit fee} = 6,748 + 0,472 \text{ Ukuran Perusahaan} + 0,256 \text{ anak perusahaan} + 0,624 \text{ Ukuran KAP} + 2,329.$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta audit fee yaitu 6,748, untuk koefisien ukuran perusahaan yaitu 0,472 dan bertanda positif. Hal ini mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap audit fee. Koefisien anak perusahaan menunjukkan nilai 0,256 dengan tanda positif. Hal ini berarti anak perusahaan memiliki pengaruh yang positif terhadap audit fee, jika anak perusahaan meningkat 1 level maka *audit fee* akan naik sebesar 0,472. Koefisien ukuran KAP sebesar 0,624. Koefisien tersebut bertanda positif, yang artinya ukuran KAP berpengaruh secara positif terhadap *audit fee*. Jika ukuran KAP naik 1 satuan maka *audit fee* akan meningkat sebesar 0,624 dengan asumsi faktor lain konstan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai $t_{\text{hitung (Ukuran Perusahaan)}} = 5,313$; $\text{Sig.} = 0,000$ ($\text{Sig.} < 0,05$). Hal ini berarti H1 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan *firm size* terhadap *audit fee*. Hubungan tersebut memiliki arah positif. Hal ini berarti semakin besar *firm size* (total aset yang dimiliki perusahaan) maka semakin besar pula *audit fee* yang harus ditanggung oleh perusahaan. Total aset yang besar akan membuat pekerjaan audit menjadi semakin banyak, hal ini berarti KAP membutuhkan lebih lama waktu dan lebih banyak personil untuk dapat menyelesaikan pekerjaan auditnya. Kebutuhan waktu yang lebih lama atau personil yang lebih banyak inilah yang mendasari besarnya *audit fee*.

Menurut Nugrahani dan Sabeni (2013) ukuran perusahaan merupakan faktor penentu yang paling penting dalam menentukan *audit fee*, Model inilah yang dijadikan acuan untuk melihat fenomena di seputar penawaran jasa audit. Penentuan ukuran perusahaan diukur berdasarkan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Yang menjadi pertimbangan auditor

dalam penetapan *fee* tersebut adalah tingkat kompleksitas perusahaan yang akan diaudit. Semakin tinggi tingkat kerumitan audit yang dilakukan oleh auditor maka semakin tinggi juga *fee* yang akan diterima auditor tersebut.

Ukuran perusahaan yang besar dengan jumlah aset (kekayaan) yang tinggi membuat proses audit yang dilakukan oleh auditor semakin rumit. Hal tersebut akan mengakibatkan peningkatan besar *fee* audit yang dibebankan pada perusahaan. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Nugrahani dan Sabeni (2013) dan Hasan dan Naser (2013) yang melakukan penelitian *audit fee* di Nigeria. Hasil dalam penelitian mereka yaitu *firm size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *audit fee*.

Berdasarkan hasil analisis dengan uji t diperoleh nilai $t_{hitung (Anak Perusahaan)} = 3,312$; Sig. = 0,001 (Sign. < 0,05). Hal ini mengartikan bahwa H2 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan *subsidiaries* terhadap *audit fee* dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti dengan semakin banyak *subsidiaries* maka akan membuat *audit fee* semakin besar. Jumlah *subsidiaries* yang semakin banyak mengartikan bahwa pekerjaan audit yang harus dilaksanakan KAP menjadi semakin banyak terkait dengan pemeriksaan laporan keuangan konsolidasian perusahaan klien tersebut. Hal ini berarti kebutuhan waktu dan personil KAP untuk melaksanakan audit menjadi semakin besar. Hal tersebut logis dengan diimbangnya kenaikan *audit fee*.

Menurut Hay *et al* (2008) bahwa anak perusahaan dapat mewakili kompleksitas jasa audit yang diberikan yang merupakan rumit atau tidaknya transaksi yang dimiliki oleh klien kantor akuntan publik untuk diaudit. Semakin besar perusahaan tersebut, maka semakin meningkatkan keberadaan anak perusahaan. Hal ini dikarenakan perusahaan pusat mengalami perkembangan positif yang signifikan pada kegiatan ekonominya, sehingga peluang untuk memperluas usaha melalui anak perusahaan semakin besar

Apabila perusahaan memiliki anak perusahaan maka proses pengauditan semakin rumit karena perusahaan harus membuat laporan konsolidasi, sehingga kompleksitas audit yang dilakukan auditor tersebut juga akan menyebabkan waktu audit yang dibutuhkan auditor lebih lama maka *fee* yang akan diterima oleh auditor juga semakin besar. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Jonson (1995) yang melakukan penelitian tentang jumlah *subsidiaries* yang menghasilkan hubungan yang positif signifikan.

Berdasarkan tabel di atas diketahui nilai $t_{hitung (ukuran KAP)} = 2,102$; Sig. = 0,037 (Sig. < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa H3 diterima, artinya terdapat pengaruh signifikan *auditor size* terhadap *audit fee* dengan arah hubungan positif. Hal ini berarti semakin besar *auditor size* (KAP *big four*) akan memperbesar *audit fee* yang harus dikeluarkan perusahaan

untuk bisa menggunakan jasa audit dari KAP tersebut. KAP *big four* yang notabeneanya KAP internasional yang banyak memiliki tenaga ahli profesional dengan reputasi yang baik dan standar kerja profesional yang baik, maka akan memperbesar standar *audit fee* nya dibandingkan dengan KAP *non big four*.

Immanuel (2014) mengatakan bahwa auditor *big four* dianggap memiliki kualitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor *non big four*, sehingga lebih mampu membatasi praktek manajemen laba. Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan besar yang *go public* memilih untuk menggunakan auditor yang berasal dari KAP *big four* untuk menghasilkan laporan keuangan dan kinerja audit yang lebih baik (Nugrahani dan Sabeni 2013).

Menurut Immanuel dan Yuyetta (2014) KAP yang memiliki reputasi internasional tentu memiliki jam terbang yang lebih tinggi, klien yang lebih banyak, efektivitas dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan kantor akuntan publik lokal. KAP *big four* dipandang lebih baik dalam memberikan jasa audit laporan keuangan perusahaan dibandingkan KAP *non big four*. Jadi dapat disimpulkan bahwa KAP *big four* dapat diartikan kualitas audit yang dihasilkan pun lebih baik dibandingkan KAP *non big four*, sehingga jika suatu perusahaan proses pengauditan menggunakan KAP *big four* maka *audit fee* yang diberikanpun akan lebih tinggi dibandingkan yang menggunakan KAP *non big four*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Immanuel dan Yuyetta (2014) yang menyatakan bahwa *auditor size* berpengaruh positif terhadap *audit fee*

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Perusahaan yang memiliki *firm size* (total aset) yang lebih besar maka akan memerlukan *audit fee* yang semakin besar juga; Perusahaan yang memiliki jumlah *subsidiaries* yang lebih banyak maka membutuhkan *audit fee* yang lebih besar juga; Penggunaan jasa KAP *big four* akan meningkatkan jumlah *audit fee* yang harus ditanggung oleh perusahaan.

Saran

Dalam penelitian ini penggunaan proksi *professional fee* untuk mengukur *audit fee* bisa menjadi proksi yang kurang sesuai karena dalam elemen *professional fee* tidak hanya berisi *audit fee* saja, tapi juga termasuk *fee* bagi jasa profesional yang lain misalnya jasa penilai, jasa advokad, jasa konsultan, dan lain-lain. Untuk itu diperlukan proksi lain yang lebih akurat dalam menilai *audit fee* di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Akuntan Publik yang dituangkan dalam *Undang-undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011*
- Desender, K.A., Crespi, R., Garcia Cestona, M. dan Aguilera, R.V. (2009). Board characteristics and audit fees: why ownership structure matters? <http://links4.emeraldinsight.com> diakses 10 april 2017.
- Firth, M. (1985). An analysis of fee cutting on initial audit engagements. *Journal of Practice & Theory*. (Spring) 23-37.
- Ghozali, I. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS Edisi 7*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- _____. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program IBM SPSS Edisi 8*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hassan, Y.M., and Naser, K. (2013). Determinants of audit fees: evidence from an emerging economy. *International Business Research*, Vol. 6, No. 8, 13-25.
- Hay, David., R. Knechel and Helen Ling. (2008). Evidence on the impact of internal control and corporate governance on audits fees. *International Journal of Auditing*, No. 12, 9-24.
- Immanuel, R. (2014). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan audit fees*. Skripsi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Immanuel, R., dan Yuyetta, E.N.A, (2014). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan audit fees. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 3, No. 3, 1-12.
- Indeks Saham Syariah Indonesia. (2017). 20 April 2017. www.sahamok.com.
- Indriantoro, N., dan Bambang S. (2011). *Metodologi penelitian bisnis untuk akuntansi dan manajemen*, edisi pertama. Yogyakarta: BPFPE.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2008. *Surat keputusan tentang kebijakan penentuan fee audit*, No : KEP.024/LAPI/VII/2008, Jakarta.
- Jonson. (1995). Supplier concentration and pricing of audit services in New Zealand. *Auditing, A Journal of Practice and Theory*. Vol.14, No. 2.
- Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan. (2013-2016)*. www.idx.co.id.
- Mulyadi. (2009). *Auditing*. Cetakan ke-6. Jakarta : Salemba Empat.

- Nugrahani, N.R., dan Sabeni, Arifin. (2013). Faktor-Faktor yang mempengaruhi penetapan fee audit eksternal pada perusahaan yang terdaftar di BEI. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol. 2, No. 2, 1-11.
- Rusmanto, T., and Waworuntu, S.R. (2015). Factors influencing audit fee in Indonesian publicly listed companies applying GCG. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 172, 63-67.
- Simunic, D. A. (1980). The pricing of audit services: theory and evidence. *Journal of accounting Reseach*, 18(1), 161-190.
- Suharli, M., dan Nurlaelah. (2008). Konsentrasi auditor dan penetapan fee audit: investigasi pada BUMN. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, Vol. 12, No. 2, 133-148.
- Wu, X. (2012). Corporate governance and audit fees: evidence from companies listed on the shanghai stock exchange. *China Journal of Accounting Research*, 5, 321-342.

